

Judul : Menghapus 300 Ayat Alquran
Tanggal : Jumat, 25 Maret 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

Penundaan Pemilu Hanya Mainan Elite

JAKARTA—Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mengungkapkan hampir semua partai menolak penundaan pemilu. Penolakan yang sama juga dialamatkan pada gagasan tiga periode masa jabatan untuk Presiden Jokowi. Tetapi, para politisi dan tokoh masyarakat kerap membuat klaim berkebalikan bahwa masyarakat ingin pemilu ditunda dan Jokowi tetap menjabat presiden.

Saiful yang juga guru besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini membantah klaim seperti yang dikemukakan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa pemilu sejumlah partai, seperti Demokrat dan Gerindra, menginginkan pemilu ditunda atau presiden tiga periode. "Saya tidak tahu Pak Luhut dapat informasi dari mana. Data dari survei nasional tidak demikian," kata Saiful pada program Bedah Politik yang bertajuk "Siapa Dukung Penundaan Pemilu?" yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV dalam rilis yang diterima pada kemarin.

Saiful mengakui asumsi bahwa para pemilih Jokowi menyen-

takan Presiden Jokowi berkinerja baik dan akan menginginkan dia terus menjadi presiden adalah logis. Namun, apakah para pemilih Jokowi itu menginginkan Jokowi kembali atau menginginkan pemilu itu ditunda? Hasil survei menunjukkan fakta yang bertentangan. Saiful mengungkapkan, Survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 menunjukkan 53% pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak menginginkan pemilu ditunda ke 2027. Hanya ada 33,2% pemilih Jokowi yang setuju. Sementara yang memilih Prabowo, 85% tidak menginginkan pemilu ditunda. Pemilih PDIP yang menginginkan tetap dua periode untuk jabatan presiden sebanyak 82%, pemilih Golkar 89%, Gerindra 79%, NasDem 95%, PKB 92%, Demokrat 83%, PKS 82%, PAN 92%, dan PPP 92%.

Data ini menunjukkan bahwa rata-rata di atas 80% pemilih partai yang menginginkan agar jabatan presiden tetap dua periode. Sementara yang menginginkan perubahan periodisasi presiden, kalau digabung,

hanya sekitar 13%. Soal aspirasi memundurkan pemilu ke 2027, pemilih PDIP yang menolak sebanyak 79%, NasDem 92%, Demokrat 87%, PKS 85%, PKB 83%, PAN 100%, Golkar 84%, Gerindra 82%, dan PPP 95%. Menurut Saiful, data-data ini menunjukkan bahwa elite politik yang bicara penundaan pemilu tidak memiliki dasar. "Jadi, tidak ada dasar empiris untuk mengklaim bahwa pemilih Demokrat, Gerindra, dan lain-lain menginginkan pemilu ditunda. Umumnya tidak ingin aturan-aturan terkait pemilu dan masa jabatan presiden tidak ingin diubah," lanjutnya.

Saiful menyatakan, bicara tidak atas dasar fakta adalah sesuatu yang memprihatinkan. Sementara opini mengenai pemilu, PKB sendiri 92% tidak ingin pemilu ditunda. "Nah, Cak Imin mewakili siapa ketika dia mengatakan rakyat menginginkan pemilu ditunda?" bunyi rilis SMRC.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar memastikan ide

penundaan Pemilu 2024 yang sebelumnya dia gulirkan itu tidak ada kaitannya dengan dorongan dari pihak mana pun, termasuk Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. "Isu penundaan Pemilu 2024 ide saya, pure dari saya," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Saat disinggung apakah sebelumnya pernah ada pertemuan dengan Luhut, Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa dirinya sudah lama tak melakukan pertemuan. Bahkan, Cak Imin mengaku hingga hari ini belum menjalin komunikasi sedikit pun. Lebih jauh, terkait isu penundaan Pemilu 2024, Cak Imin mengklaim memiliki *big data* yang berbeda dengan Luhut. Diketahui, Luhut pernah mengklaim bahwa isu penundaan pemilu ini merujuk dari keinginan masyarakat yang berhasil terpotret dalam *big data*-nya. "Beda, dia (Luhut) 110 juta, saya 100 juta," ujarnya.

by fellyutama

Surat Keputusan Pembentukan Pemuda Perindo Sumut



OKZONE/ARIF JULIANTO

Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendy Syahputra (dua kiri) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Pemuda Perindo Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kepada Ketua DPW Pemuda Perindo Muhammad Hendrik (dua kanan) disaksikan Direktur Eksekutif Pemuda Perindo Benedictus Telaumbanua (kin) dan Ketua DPW Partai Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan (Kanan) di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, kemarin. Effendi mengatakan, pemberian SK telah gencar dilakukan Partai Perindo kepada provinsi-provinsi lain di Indonesia. Menurutnya, hal itu dilakukan guna mempercepat pembentukan struktur di setiap daerah.